

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji atau menyelidiki pengaruh dari komitmen manajemen, kesulitan pengukuran, mandat legislative, dan pelatihan terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja (SPK), dan penggunaan informasi kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja di pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah

Populasi dari penelitian ini adalah semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi pemerintah daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk memperoleh sampel yang representatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural (Eselon 2,3,4) yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keuangan dan aset di setiap OPD

Hasil dari penelitian ini sebagai kesimpulan adalah bahwa komitmen manajemen terbukti berpengaruh secara positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja (SPK), dan penggunaan informasi kinerja. Kesulitan pengukuran tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja. Kesulitan pengukuran terbukti berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi kinerja. Mandat legislatif terbukti berpengaruh secara positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja (SPK), penggunaan informasi kinerja. Pelatihan terbukti berpengaruh secara positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja (SPK). Pelatihan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi kinerja. Pengembangan sistem pengukuran kinerja terbukti berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan informasi kinerja, pengembangan sistem pengukuran kinerja terbukti berpengaruh positif secara langsung terhadap Akuntabilitas kinerja. Penggunaan informasi kinerja terbukti berpengaruh positif secara langsung ke akuntabilitas kinerja.

Kata kunci : sistem pengukuran kinerja, penggunaan informasi kinerja, akuntabilitas kinerja, isomorfisme institusional